

TESIS

**MODERASI POLITISI PEREMPUAN TENTANG FENOMENA
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA**



Disusun oleh:

Tri Vena Putri

072014753002

PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

**MODERASI POLITISI PEREMPUAN TENTANG FENOMENA
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA**



TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
pada Program Studi Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Disusun oleh:

Tri Vena Putri

072014753002

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL:

Oleh:

Pembimbing Ketua



Prof. Bagong Suyanto, Drs., M.Si
NIP. 196609061989031002

Pembimbing Kedua



Dr. Siti Mas'udah S.Sos., M.Si
NIP.197908052007012001

Mengetahui Ketua Program Studi



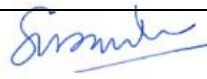
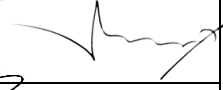
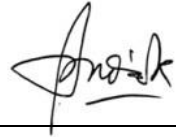
Dr. Siti Mas'udah S.Sos., M.Si
NIP.197908052007012001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2021

Pukul 09.00 WIB

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	<u>Prof. Emy Susanti</u> NIP. 195803151984032001	
Anggota	<u>Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si</u> NIP. 196001201985021001	
	<u>Prof. Bagong Suyanto, Drs., M.Si</u> NIP. 196609061989031002	
	<u>Dr. Siti Mas'udah S.Sos., M.Si</u> NIP.197908052007012001	
	<u>Dr. Retno Andriati, Dra., MA.</u> NIP. 196110101986012001	

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi penulisan tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasi/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan tesis

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 7 Mei 2021



Tri Vena Putri
NIM. 072014753002

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan yang maha Esa, penulis memanjatkan puji syukur atas rahmat, hidayah, dan anugrah yang senantiasa telah diberikan-Nya Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis yang berjudul Moderasi Politisi Perempuan Tentang Fenomena Kekerasan Seksual di Kota Surabaya diantaranya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing pertama.
2. Dr. Siti Mas'udah S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing kedua
3. Seluruh dosen penguji, Prof. Emy Susanti, Prof. Mustain, Dr. Retno Andriati, Prof. Bagong dan Dr. Siti Mas'udah yang telah membimbing dan memberi saran dalam pengerjaan tesis.
4. Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Dr. Siti Mas'udah S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi Universitas Airlangga.
6. Seluruh pengajar Departemen Sosiologi Universitas Airlangga yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan.

7. Orang tua (Mama, Alm. Papa), Kakak yang selalu mendukung dalam bentuk materi maupun non-materi, dan mendoakan selalu agar penyusunan Tesis ini dapat segera selesai.
8. Saudara kembar, Tri Veny Putri, yang saling mendukung satu sama lain untuk bersama-sama menyelesaikan studi Magister di Universitas Airlangga.
9. Seluruh informan penelitian dari pihak Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Savy Amira *Womens's Crisis Centre*.
10. Seluruh teman-teman Magister Sosiologi Angkatan 2019 Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun substansial. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dan kesempurnaan laporan ini agar bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juni 2021

Tri Vena Putri

RINGKASAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksualitas yang dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Tindakan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban tanpa adanya persetujuan atau dilakukan secara paksa. Suatu tindakan seksual dikategorikan kedalam kekerasan seksual jika di dalamnya dilakukan secara paksa oleh salah satu pihak, ketiadaan relasi yang setara. Jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat, dan korban yang paling tinggi mengalami kekerasan seksual adalah perempuan. Peningkatan jumlah kasus tersebut tidak diimbangi dengan penyelesaian kasus yang tuntas. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, ada 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Perempuan korban kekerasan seksual tidak berani melaporkan kasus mereka bahkan sekadar menceritakannya ke pihak ketiga. Sehingga tindakan kekerasan seksual ini ibarat fenomena gunung es. Ketidakberanian perempuan korban kekerasan seksual dalam melaporkan kasus mereka disebabkan oleh beberapa fenomena yang mereka hadapi di masyarakat.

Perempuan korban kekerasan seksual mengalami hambatan dan tantangan ketika melaporkan kasus mereka ke jalur hukum. Politisi perempuan yang sekaligus aktivis gender melakukan moderasi tentang fenomena kekerasan seksual. Sebagaimana dalam pengertian konsep moderasi, moderasi dilakukan oleh cendekiawan atau individu yang berkompetensi di bidangnya. Politisi perempuan yang juga merupakan aktivis gender di Surabaya, adalah anggota dari organisasi massa Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur (KPI Jatim) dan LSM

Savy Amira *Women's Crisis Centre*. Para politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira memoderasikan nilai keadilan dan kesetaraan gender di tengah-tengah nilai patriarki yang ada di masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Proses moderasi tersebut dapat dijelaskan melalui Teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan karena aktor moderasi yang memenuhi kriteria diantaranya sebagai politisi perempuan yang berperspektif gender. Peneliti menemui informan dengan kriteria tersebut merupakan anggota DPRD Jawa Timur dan merupakan aktivis dari anggota KPI Jatim dan Savy Amira. Informan yang peneliti wawancarai sebanyak lima informan. Kelima informan dari dua organisasi tersebut hubungannya adalah saling kenal sehingga peneliti bukan berfokus pada pemilihan dua lokus tersebut saja.

Peneliti juga memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui informan non-subyek dan data melalui internet. Teori konstruksi sosial milik Berger digunakan sebagai pisau analisis penelitian. Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial bertujuan untuk mengkaji proses moderasi yang terus mengalami dialektika. Moderasi politisi perempuan tentang fenomena kekerasan seksual dianalisis ke dalam beberapa tahap proses sesuai dengan teori konstruksi sosial. Selain menggunakan teori konstruksi sosial, penelitian ini menggunakan teori dukungan sosial milik Sherburne & Stewart.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira tentang fenomena kekerasan seksual terbentuk melalui tiga proses tahapan yang sesuai dengan Teori Konstruksi Sosial Berger sebagai kerangka teorinya. Ketiga tahap proses moderasi tersebut adalah eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pada proses eksternalisasi, politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira memaknai kekerasan seksual sebagai realitas atau fenomena yang berada di luar diri mereka. Perempuan korban kekerasan seksual di mata masyarakat dimaknai sebagai penyebab dari terjadinya tindakan kekerasan seksual. Pada tahap ini diperoleh adanya stigma negatif masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan tindakan intimidatif oleh oknum aparat penegak hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Selain itu, politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira memiliki konstruksi sosial kekerasan seksual dalam upayanya mereproduksi makna kekerasan seksual di masyarakat. Pada proses obyektivasi, politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira berhadapan dengan kenyataan obyektif. Berkaitan dengan produk sosial pada proses ini, dalam menangani kekerasan seksual, para politisi perempuan memaksimalkan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukuman bagi tindak pidana termasuk tindakan kekerasan seksual. Selain itu, politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira menemui fenomena yang menjadi isu-isu gender di masyarakat sebagai *stock of knowledge*, seperti *catcalling*, menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh perempuan, dan pemaksaan melakukan hubungan intim di ranah rumah tangga.

Selanjutnya pada proses internalisasi, politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira berada pada momen moderasi yang melakukan upaya secara

terstruktur dan massif terhadap korban kekerasan seksual dalam menjalin interaksi agar korban merasa aman, mendapatkan keadilan, dan memperoleh hak mereka di tengah-tengah diskriminasi dan intimidasi yang mereka alami di masyarakat sebagai perempuan korban kekerasan seksual. Moderasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu moderasi bersifat langsung dan moderasi bersifat tidak langsung. Moderasi bersifat langsung dilakukan oleh politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira berupa advokasi terkait penuntutan keadilan bagi korban kekerasan seksual terutama perempuan. Moderasi yang bersifat tidak langsung adalah berupa pemberian sosialisasi dan seminar kepada masyarakat mulai dari usia anak, remaja, hingga dewasa terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual termasuk mencegah adanya potensi pelaku, dan penyikapan terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar.

Dukungan sosial yang diberikan politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira adalah berupa dukungan instrumental, dukungan emosional, dukungan pemberian informasi, dan dukungan penilaian. Dukungan instrumental adalah dukungan yang diberikan berupa pemberian dukungan material. Pendampingan hukum atas kasus kekerasan seksual terhadap korban, memberikan bantuan finansial kepada korban yang merupakan ibu rumah tangga karena masih harus membiayai anaknya sekolah. Bentuk dukungan emosional dengan berempati terhadap korban, mendengarkan cerita korban tanpa menjustifikasi. Pemberian informasi melalui penyediaan layanan pengaduan kekerasan berbasis gender yang tersedia di *platform* atau internet, membantu korban memberikan rujukan pendampingan psikologi ataupun pendampingan hukum kepada korban sesuai dengan kebutuhan mereka. Dukungan penilaian politisi perempuan KPI Jatim dan

Savy Amira diberikan kepada korban berupa nasihat dan saran, yaitu terus mendukung korban untuk tidak takut melaporkan pelaku sekalipun pelaku merupakan orang terdekat.

Hasil moderasi yang dilakukan oleh politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira tentang fenomena kekerasan seksual bertolak dari temuan Berger. Hal ini karena penggunaan Teori Konstruksi Sosial dalam penelitian ini selain menghasilkan makna terhadap suatu realitas, pada konsep moderasi bertujuan untuk menghasilkan perubahan sosial utamanya terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan keadilan. Dalam proses moderasi, masih akan terus mengalami dialektika yang dianalisis sesuai dengan temuan Berger, yaitu Teori Konstruksi Sosial.

SUMMARY

Sexual violence is an act of sexuality that can occur at any time and to anyone. This action is carried out by the perpetrator against the victim without consent or is carried out by force.. A sexual act is categorized as sexual violence if it is carried out by force by one of the parties, without an equal relationship. The number of cases of sexual violence is increasing every year, and the victims who experience sexual violence with the highest proportion are women. The increase in the number of cases was not matched by complete case resolution. Komnas Perempuan notes that violence against women has increased from year to year. In 2004, there were 5,934 cases of violence against women. This figure increased compared to 2001 (3,169 cases) and 2002 (5,163 cases). Women victims of sexual violence do not have the courage to report their cases, even just telling to someone. So that acts of sexual violence are like an iceberg phenomenon. The courage of women victims of sexual violence in reporting their cases is due to several phenomena they face in society.

Women victims of sexual violence experience obstacles and challenges when reporting their cases to legal channels. Women politicians who are also gender activists moderate the phenomenon of sexual violence. As in the understanding of the concept of moderation, moderation is carried out by scholars or individuals who are competent in their fields. A woman politician who is also a gender activist in Surabaya, is a member of the mass organization Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur (KPI Jatim) and the NGO Savy Amira *Women's Crisis Centre*. The women politicians KPI Jatim and Savy Amira moderate the value of justice and gender equality in the midst of the patriarchal values that exist

in society towards women victims of sexual violence. This moderation process can be explained through Peter L. Berger's theory of social construction.

This research method is qualitative with a case study approach. The case study approach is carried out because moderating actors who meet the criteria include being female politicians with a gender perspective. Researchers met informants with these criteria who were members of the DPRD of East Java and were activists from members of the KPI Jatim and Savy Amira. The informants that the researcher interviewed were five informants. The relationship between the five informants from the two organizations is that they know each other so that the researcher does not focus on selecting the two locus.

Researchers also obtained primary data and secondary data. Primary data obtained through in-depth interviews and observations. Secondary data were obtained through non-subject informants and data via the internet. Berger's social construction theory is used as a tool for research analysis. Researchers using social construction theory aim to examine the process of moderation which continues to experience dialectics. The moderation of women politicians towards the phenomenon of sexual violence is analyzed into several stages of the process according to social construction theory. In addition to using social construction theory, this study uses proprietary social support theory Sherburne & Stewart.

The results showed that the moderation of female politicians KPI Jatim and Savy Amira towards the phenomenon of sexual violence was formed through three stages in accordance with Berger's Social Construction Theory as the theoretical framework. The three stages of the moderation process are

externalization, objectivation, and internalization. In the externalization process, female politicians KPI Jatim and Savy Amira interpreted sexual violence as a reality or phenomenon that was outside of themselves. In the society's perspective, women victims of sexual violence are interpreted as the cause of acts of sexual violence. At this stage, there is a negative stigma from society towards women victims of sexual violence and discriminatory actions by unscrupulous law enforcement officers against women victims of sexual violence. Other than that, female politicians KPI Jatim and Savy Amira have a social construction of sexual violence in their efforts to reproduce the meaning of sexual violence in society. In the objectivation process, female politicians KPI Jatim and Savy Amira faced objective realities. With regard to the social product of this process, in dealing with sexual violence, women politicians maximize the use of the Criminal Code (KUHP) as a basis for punishment for criminal acts including acts of sexual violence. In addition, female politicians KPI Jatim and Savy Amira encountered phenomena that become gender issues in society as a stock of knowledge, such as catcalling, determining behaviors that should be done by women, and coercion of intercourse in the household.

Furthermore, in the internalization process, female politicians KPI Jatim and Savy Amira were in a moment of moderation who made structured and massive efforts against victims of sexual violence in establishing interactions so that victims felt safe, received justice, and obtained their rights in the midst of discrimination and intimidation. They experience in society as women victims of sexual violence. Moderation is carried out in two forms, namely direct moderation and indirect moderation. Direct moderation was carried out by female politicians

KPI Jatim and Savy Amira in the form of advocacy related to prosecuting justice for victims of sexual violence, especially women. Indirect moderation is in the form of providing outreach and seminars to the community starting from the age of children, adolescents,

The social support provided by female politicians KPI Jatim and Savy Amira is in the form of instrumental support, emotional support, information support, and assessment support. Instrumental support is the support provided in the form of material support. Legal assistance for cases of sexual violence against victims, providing financial assistance to victims who are housewives because they still have to pay for their children's education. Forms of emotional support by empathizing with the victim, listening to the victim's story without justifying. Providing information through the provision of gender-based violence complaint services available on platforms or the internet, helping victims provide referrals for psychological assistance or legal assistance to victims according to their needs.

The results of the moderation carried out by female politicians from KPI Jatim and Savy Amira on the phenomenon of sexual violence were contrary to Berger's findings. This is because the use of Social Construction Theory in this study in addition to producing meaning for a reality, the concept of moderation aims to produce social change, especially for women victims of sexual violence who have not received justice. In the process of moderation, there will still be a dialectic which is analyzed according to Berger's findings, namely Social Construction Theory.